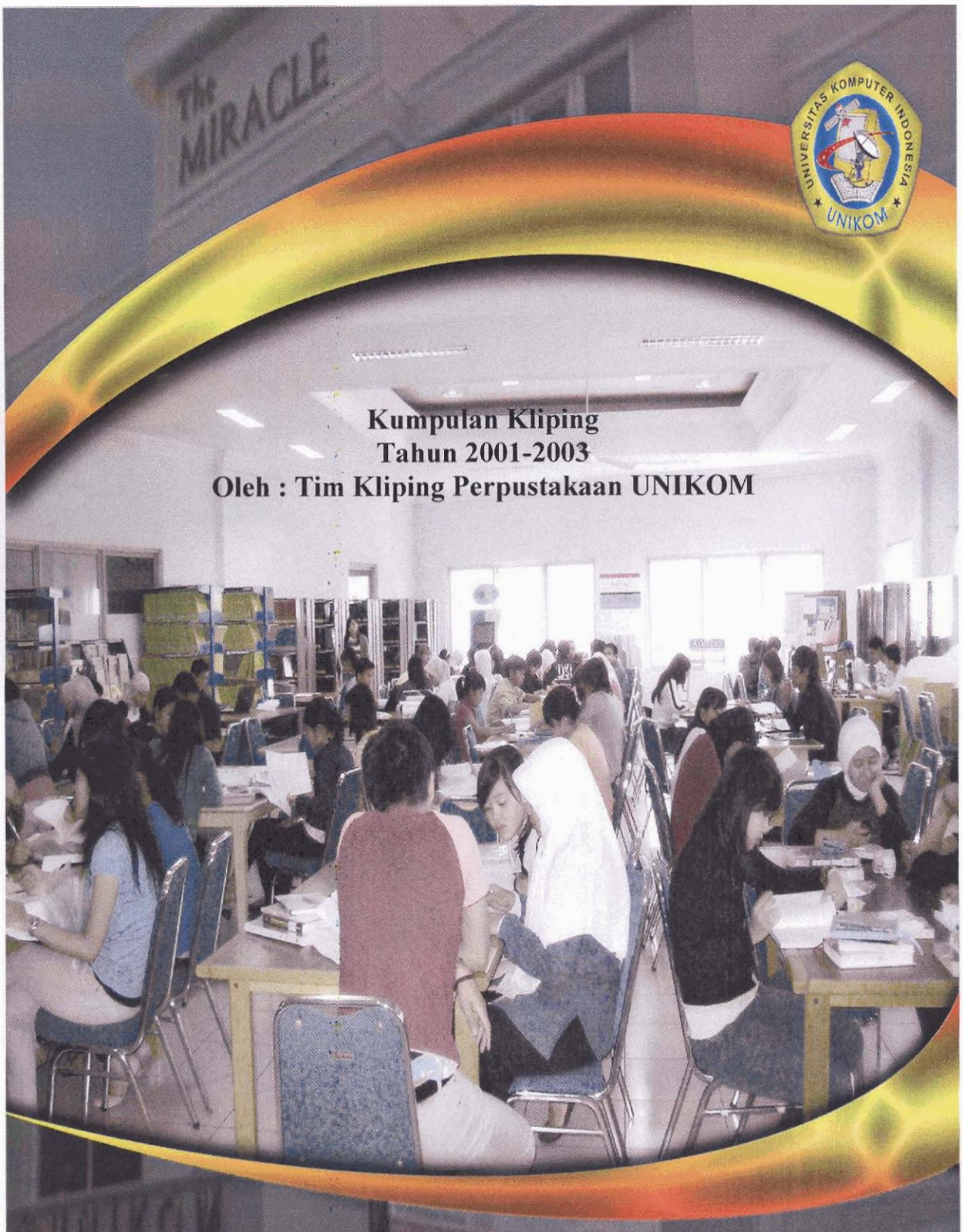


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Kamis / 20 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 16 / 1-7
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : MANAJEMEN / 658

Indosat dan Pertarungan yang Semakin Kusut

KEKISRUHAN divestasi saham pemerintah di Indosat akhirnya berbuntut penggantian Direksi Indosat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilaksanakan hari Kamis (20/6) ini. Dalam perkembangan terakhir, semakin kelihatan pertarungan antara pihak yang ingin menggagalkan dengan pihak yang ingin menyukseskan privatisasi, sebagaimana pernah dikemukakan analis pasar modal Lin Che Wei bulan lalu.

NAMUN, petanya menjadi lebih rumit. Bukan hanya empat pihak yang "bertarung" yaitu Manajemen Indosat, Kementerian Negara BUMN, Credit Suisse First Boston (CSFB) dan Danareksa sebagai penasihat keuangan pemerintah, dan lembaga keuangan lain yang mendukung pelaksanaan *right issue* seperti pernah diungkapkannya.

Setidaknya, *manajemen* Indosat sendiri terpecah dalam dua kelompok, yang mendukung *right issue* dan yang menolaknya. *Right issue* itu sendiri, disebut-sebut sebagai *biang* kegagalan privatisasi 13,2 persen saham Indosat. Total saham Indosat *sendiri* ada 1.035.000 lembar saham.

"Bagaimana mungkin orang mau membeli saham pemerintah dengan harga tinggi jika nanti akan ada *right issue* yang harganya lebih murah," kata Lin Che Wei.

Pemerintah yang semula akan menjual sahamnya 11,3 persen dengan kisaran harga Rp 12.300, tidak tercapai. Dua penasihat keuangan pemerintah, Danareksa dan CSFB hanya mampu memasarkan 8,1 persen dengan harga terbaik Rp 12.000 per saham. Pemerintah memperoleh dana sekitar Rp 1 trilyun.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Paskah Suzetta, rencana *right issue* tersebut diatur dalam satu pertemuan di Singapura, antara tim dari Indosat, Mandiri Sekuritas, dan Merrill Lynch. Menurut dia, terjadi banyak kejanggalan dalam rencana *right issue* tersebut yang harus diteliti tuntas oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), karena telah menimbulkan kerugian negara dan Indosat sendiri.

"Dibanding total dana yang dibutuhkan, dana yang akan diambil dari *right issue* tidak begitu besar. Jadi, mengapa harus *right issue*," ujar dia.

Dilihat nilainya, dana yang hendak diraih dari *right issue* tersebut relatif kecil dibanding seluruh kebutuhan dana yang berkaitan dengan proses akuisisi 25 persen saham Satelindo yang dimiliki DT. Total dana yang dibutuhkan Indosat adalah, 450 juta dollar AS, dimana 325 juta dollar AS akan digunakan untuk membeli 25 persen saham Indosat yang dimiliki DT, 75 juta dollar AS untuk injeksi guna membuka batas maksimum investasi Satelindo, dan 50 juta dollar AS lagi untuk membuka batas maksimum investasi Indosat sendiri.

Rencananya, dana tersebut akan diperoleh dari uang tunai perusahaan sebesar 250 juta dollar AS, dari penerbitan obligasi sebesar 100 juta dollar AS, dari *right issue* sebesar 60 juta dollar AS, dan 40 juta dollar AS lagi akan dicari dari sumber-sumber lain. Hak *right issue* maksimal sebanyak 5 persen diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 1998.

Menurut dokumen yang diperoleh, Tim Negosiasi Indosat pada tanggal 7-8 Mei lalu mendapat tugas untuk rapat dengan Deutsche Telekom (DT) Asia di Singapura, berkaitan dengan pembelian 25 persen saham Satelindo yang dimiliki DT. Namun, tim negosiasi juga melakukan pertemuan dengan pihak Merrill Lynch dan Mandiri Sekuritas.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR tanggal 23 Mei lalu, Menneg BUMN Laksamana Sukardi menyatakan, salah satu penyebab kegagalan divestasi karena manajemen Indosat tidak patuh dan ngotot memaksakan *right issue* lima persen saham Indosat. Sehari sebelumnya, Laksamana juga melontarkan dugaan terjadi *insider trading* oleh Merrill Lynch yang melakukan penjualan besar-besaran saat pemerintah melakukan penawaran terbatas (*private placement*). Padahal rekomendasi analisnya adalah "beli" untuk saham Indosat. Alasan Laksamana, Merrill Lynch adalah penasihat keuangan Indosat, sehingga ada benturan.

Akan tetapi, Direktur Merrill Lynch, Lili Wijaya secara tidak langsung membantah tudingan Laksamana itu. Ia menyatakan semua transaksi yang dilakukan semuanya wajar. Menjual dan membeli saham tergantung keputusan nasabah, pihaknya hanya memberikan rekomendasi.

Hari itu juga (16 Mei), Bursa Efek Jakarta (BEJ) menghentikan sementara perdagangan saham Indosat pada harga Rp 12.600, dengan alasan informasi yang disampaikan pihak Kantor Kementerian BUMN tidak jelas. Waktu itu, pihak Menneg BUMN menyurati BEJ dan Bapepam yang intinya agar mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses pelepasan saham pemerintah.

Akan tetapi, BEJ tidak segera melaksanakan permintaan itu. Alasan Direktur Utama BEJ, Erry Firmansyah, BEJ hanya bisa melakukan tindakan berdasarkan surat dari emiten, dalam hal ini adalah manajemen Indosat. Ketika BEJ menanyakan permintaan Kementerian BUMN itu kepada manajemen Indosat, mereka menyatakan tidak tahu-menahu. BEJ akhirnya melakukan penghentian sementara perdagangan saham Indosat, setelah harga jatuh Rp 600 per saham dibanding harga penutupan sehari sebelumnya.

Soal status Merrill Lynch — begitu juga Mandiri Sekuritas — sebagai penasihat keuangan Indosat, menjadi agak aneh. Pasalnya, Direktur Utama Indosat Hari Kartana kemudian

mengaku bahwa sampai saat ini manajemen Indosat belum memutuskan dan menunjuk penasihat keuangan Indosat untuk berbagai kepentingan transaksinya, kecuali untuk pembelian (*buy out*) 25 persen saham Satelindo yang dimiliki Deutsche Telekom (DT) senilai Rp 325 juta. Untuk transaksi ini, Mandiri Sekuritas yang ditunjuk menerima komisi (*fee*) senilai 550.000 dollar AS.

◆◆◆

PERANG dokumen dan adu argumentasi baik secara terang-terangan maupun diam-diam akhirnya tidak hanya terjadi antardireksi Indosat sendiri, tetapi telah melibatkan berbagai lembaga keuangan yang terkait. Pihak Mandiri Sekuritas sendiri mengaku, dirinya juga telah ditunjuk menjadi penasihat keuangan untuk *right issue*, dan penerbitan obligasi sebesar Rp 3 trilyun, dengan dasar fotokopi mandat yang ditandatangani Direktur Utama Indosat Hari Kartana.

Namun, Hari Kartana membantah hal tersebut. Menurut Hari, mandat yang diberikan kepada Mandiri Sekuritas hanya sebagai penasihat keuangan pembelian saham milik DT saja. Akan tetapi, dalam proposal mandat yang diajukan, Mandiri Sekuritas memasukan juga item sebagai penasihat keuangan dalam *right issue*, dan penerbitan obligasi. Proposal ini, belum ditandatangani Hari Kartana.

Fotokopi surat mandat yang sudah ditandatangani Hari Kartana yang dibawa pihak Mandiri Sekuritas, menurut Hari adalah untuk internal Indosat. Dokumen internal tersebut, oleh orang dalam Indosat sendiri telah diberikan kepada Mandiri Sekuritas. Sebagai bukti, menurut Hari, dalam dokumen aslinya dirinya tidak bertanda tangan di atas materai. Seharusnya, mandat yang dipegang oleh Mandiri Sekuritas adalah yang ditandatangani Hari di atas materai, dan itu belum pernah ditandatanganinya.

Hari bahkan menyatakan akan segera menggelar *beauty contest* untuk penunjukan penasihat keuangan (*financial adviser*) bagi penerbitan obligasi Indosat sebesar Rp 3 trilyun.

Ketika ditanya mengapa ada dokumen seperti itu dipegang Mandiri Sekuritas, Hari Kartana mengatakan, "Ada yang menohok saya."

◆◆◆

DALAM pemeriksaan [redacted] terhadap dugaan *trading*, persoalan semakin berkembang. Setidaknya, sampai saat ini ditemukan tiga lagi dugaan pelanggaran peraturan yaitu praktik perusahaan efek tanpa izin, manipulasi pasar, dan *miss leading*. Dari kesemuanya, yang telah selesai diperiksa adalah dugaan praktik perusahaan efek tanpa izin yang melibatkan Credit Suisse First Boston (CSFB) dan Nusantara Capital.

CSFB adalah penasihat keuangan pemerintah dalam divestasi 11,3 saham Indosat. CSFB yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia bertugas menjual saham Indosat kepada investor asing. Nah, dalam pemeriksaan, Bapepam menemukan formulir penawaran saham Indosat dari Nusantara Capital, yang belakangan diketahui tidak memiliki izin dari Bapepam. Nusantara Capital sendiri kepada Bapepam mengakui telah mengirim form penawaran tersebut dalam rangka divestasi yang tengah dilakukan pemerintah, dan mendapatkan order dari CSFB.

Sesuai UU Pasar Modal Pasal 30 (1) berbunyi: Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Sanksi atas pelanggaran pasal ini termuat dalam Pasal 103, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima milyar. Selain itu, para pelaku yang terlibat juga dapat dicabut izinnya sehingga tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan pasar modal.

Menurut sumber di Bapepam, hasil pemeriksaan terhadap dugaan praktik perusahaan efek tanpa izin tersebut telah diserahkan kepada Ketua Bapepam Herwidayatmo hari Senin (10/6) lalu. Tim pemeriksa telah menemukan indikasi yang kuat terjadinya pelanggaran peraturan. Namun, Herwidayatmo sendiri ketika dikonfirmasi membantah telah menerima laporan tersebut.

"Siapa pun yang ketahuan melanggar, saya akan obyektif. Saya tahu ada banyak rumor di luar tentang saya. Tetapi percayalah, siapa pun, biar teman saya sekalipun, kalau memang bersalah akan saya tindak tegas," ujar dia.

Di kalangan anggota DPR memang timbul keraguan akan keberanian Bapepam untuk menindak tegas pelanggar aturan pasar modal, karena diduga banyak pihak yang terlibat memiliki kedekatan dengan pejabat Bapepam. Anggota Komisi IX DPR, Rizal Djalil dalam rapat dengar pendapat dengan Menneg BUMN akhir bulan lalu bahkan mengatakan," Kita harus cermati adanya oknum-oknum Bapepam yang berkolaborasi dengan manajemen Indosat."

Situasi ini, menjadi in keruwetan tarik menarik antar berbagai kepentingan dalam proses privatisasi BUMN. Menurut Lin Che Wei, sebenarnya keruwetan privatisasi bukanlah hal baru. Cuma yang terjadi dalam kasus Indosat ini menjadi begitu jelas terlihat. Jika tidak dapat diusut tuntas dan cepat oleh Bapepam, dikhawatirkan hal ini akan berpengaruh terhadap minat investor asing terhadap program privatisasi pemerintah yang masih akan terus berlangsung. "Mereka akan mengukur diri, jika investasi, mampu tidak, menghadapi semua yang tergambar nyata ini," katanya.

(ANV)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

KINERJA KEUANGAN INDOSAT

Laba Bersih

• Tahun 1999	Rp 1,59 trilyun
• Tahun 2000	Rp 1,64 trilyun
• Tahun 2001	Rp 1,45 trilyun

Triwulan I	2001	2002
• Pendapatan usaha	Rp 772 milyar	Rp 1,542 trilyun
• Beban usaha	Rp 387 milyar	Rp 1,069 trilyun
• Laba sebelum pajak	Rp 647 milyar	Rp 550 milyar
• Laba bersih	Rp 458 milyar	Rp 195 milyar

Sumber: Laporan Keuangan Indosat

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 6 / JUNI / 2002
Him/Kolom : 19 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 650 : 1 / IKLAN

Reklame Menambah Sumpek Kota Bandung

BANDUNG, KOMPAS — Sekitar 1.500 reklame yang bertebaran memenuhi seluruh jalan dan sudut Kota Bandung, dinilai tidak sebanding dengan luas kota. Kawasan Dago yang menjadi etalase Kota Bandung, terasa sumpek dengan menjamurnya reklame yang saling menutup. Sementara retribusi yang diperoleh dari reklame masih minim, hanya sekitar Rp 4 milyar per tahun.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung Ridwan Juniarso, Rabu (5/6), mengatakan, masalah reklame menjadi persoalan serius. "Pemasangan reklame tidak beraturan telah merugikan banyak pihak. Tak jarang di beberapa ruas jalan terjadi kecelakaan lalu lintas akibat reklame menutup pandangan pengemudi," katanya.

Mengenai minimnya perolehan dana dari reklame, Ridwan mengatakan, tidak tahu menahu. Menurut dia, dinas yang dipimpinnya hanya menangani masalah penertiban dan pengeluaran izin saja, sementara uangnya masuk ke Dinas Pendapatan.

Ridwan menyebut pemasangan reklame di kawasan Dago, Jalan Setiabudi, dan di Jalan Sudirman, telah mengganggu masyarakat. Di samping menutup pandangan, pemasangan reklame telah menyita ruang trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pemerintah Kota Bandung menggelar penertiban reklame untuk menjaga keindahan kota. Menurut Ridwan, puluhan *billboard* berukuran 5 x 10 meter, papan reklame, spanduk, dan ratusan umbul-umbul ditertibkan. (ZAL)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 11 / OKTOBER / 2002
Hlm/Kolom : 15 / 1-3
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 662 / BAHAN BAKAR

Pertamina Akan Naikkan Harga Elpiji

MAKASSAR, KOMPAS — Setelah menaikkan harga Elpiji dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.400 per kilogram (naik Rp 300 per kilogram) tahap pertama 6 Juli lalu, kini menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, Pertamina kembali akan menaikkan harga Elpiji. Langkah ini diperlukan agar Pertamina tidak terlalu merugi dari bisnis elpiji.

"Apabila pada tahap pertama Pertamina menaikkan harga elpiji Rp 300 per kilogram, pada tahap kedua karena mendekati Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, mungkin kenaikannya tidak akan lebih dari Rp 300 per kilogram. Bahkan, mungkin di bawah itu," kata General Manager LPG dan Produk Khusus Pertamina Iqbal Hasan, Kamis (10/10), di sela-sela Forum Pertemuan Aspal Pertamina di Makassar.

Sebelum 6 Juli 2002 saat harga elpiji Rp 2.100 perkilogram, kata Iqbal, Pertamina merugi sekitar Rp 900 perkilogram. Sesudah kenaikan harga, kerugian Pertamina berkurang menjadi sekitar Rp 600 per kilogram. Namun, karena kurs sudah turun menjadi Rp 9.000, maka kerugian Pertamina untuk elpiji masih dikisaran Rp 500 per kilogram. Dengan jumlah penjualan mencapai 1 juta metrik ton per tahun, dari gas alam cair ini Pertamina masih merugi Rp 900 milyar.

Menurut Iqbal, Pertamina akan memperbaiki kerugian ini dengan menaikkan harga setahap demi setahap. Tahap pertama sudah dilakukan 6 Juli lalu disertai meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Untuk menutupi seluruh utang Pertamina dari penjualan Elpiji, Iqbal memperkirakan adanya dua tahap kenaikan lagi (menjadi empat tahap). Berdasarkan survei yang dilakukan Pertamina, memang masih ditemui pelanggaran, tetapi tidak menyangkut pengurangan isi (volume) yang dilakukan suplier.

Aspal menurun

Ditanya prospek penjualan aspal yang juga dilakukan Pertamina, Iqbal mengakui adanya kecenderungan penurunan minat pengusaha untuk menggunakan aspal produk dalam negeri (Pertamina). Meski ada tren menurun, na[illegible] Iqbal mengatakan akan [illegible] upaya segera membang[illegible]kan kembali daya beli p[illegible] usaha dengan memprod[illegible] aspal yang jauh lebih berkualitas.

Iqbal mengakui, selama ini penjualan aspal dalam negeri produk Pertamina memang masih *leader*. Namun dia mengingatkan adanya *pesaing di era* perdagangan bebas ini yang masuk ke Indonesia, antara lain dari Shell dan Esso. "Pertamina tentu tidak boleh lengah menghadapi pesaing asing itu," katanya.

Iqbal mengungkapkan, Pertamina saat ini memproduksi aspal setiap hari. Dalam setahun Pertamina menghasilkan 720.000 ton aspal. Namun, dari jumlah itu yang terpakai hanya 300.000 sampai 350.000 ton saja. Masih ada sisa aspal yang tidak terjual rata-rata sekitar 400.000 ton. Oleh Pertamina, sisa aspal yang tidak terjual dikonversi menjadi bahan bakar dalam bentuk lain, meskipun harga jualnya hanya tinggal setengahnya dari aspal asli. (PEP)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 23 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 1 DAN 11 / 2 DAN 6, 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / KLASS : MINYAK BUMI / 665.6

Jepang dan Korsel Bisa Putuskan Kontrak Pembelian

Potensi Kerugian Negara Rp 1 Trilyun per Bulan

Jakarta, Kompas

Kemampuan Bontang LNG Centre di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menutupi kevakuman pasokan gas alam dari kilang gas Arun, hanya bisa bertahan hingga bulan Juli. Jika sampai bulan Juli, ExxonMobil Oil Indonesia Inc belum juga bisa beroperasi, maka potensi kerugian negara mencapai Rp 1 trilyun per bulan (100 juta dollar AS pada kurs Rp 10.000 per dollar AS).

"Kita akan *ngalami* kerugian sangat besar, 100 juta dollar AS per bulan," kata Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR dengan Pertamina dan ExxonMobil Oil Indonesia Inc di Jakarta, Kamis (22/3).

Rapat yang diadakan tertutup selama empat setengah jam itu dihadiri oleh Presiden Direktur ExxonMobil Oil Indonesia Inc Ronald I Wilson.

ExxonMobil Oil Indonesia memasok gas alam cair (LNG/ *liquedied natural gas*) ke PT Arun NGL Co untuk diproses dan kemudian dieskpor.

Exxon menghentikan operasinya di Aceh sejak 9 Maret 2001 karena gangguan keamanan yang dialaminya. Dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR, pihak Exxon menyatakan, akan segera melanjutkan operasinya bila ada jaminan keamanan.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR meminta agar pemerintah memberi perhatian yang serius untuk memulihkan keamanan di Aceh. Masalah keamanan, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Emir Moeis, sudah lama dikeluhkan, tetapi tidak segera diambil tindakan.

"Kalau ExxonMobil tidak memutuskan untuk menghentikan operasinya, kita masih berleha-leha dan menganggap remeh persoalan. Dengan kejadian itu, baru ada perhatian. Tidak bisa tidak, pemerintah harus mengusahakan keamanan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, dan tegas. Namun, tetap harus memperhatikan trauma masyarakat Aceh dan hak asasi manusia," kata Emir yang memimpin RDPU Komisi VIII DPR.

Petronas

Baihaki menjelaskan, kemampuan Bontang memasok LNG sekitar tujuh atau delapan kargo per bulan, yang masing-masing berisi 125.000 meter kubik gas alam. Padahal, kebutuhan yang harus dipenuhi Arun untuk memenuhi komitmennya kepada Jepang, dan Korea setiap bulannya 10 kargo yang masing-masing bernilai 10 juta dollar AS, atau total bernilai 100 juta dollar AS.

"Untuk menutupi kebutuhan dua kargo lagi, kami sedang melakukan pembicaraan dengan Petronas (Malaysia). Kami juga bisa bicara dengan Australia, karena ketika Australia mengalami kesulitan kami pernah membantunya," ujar Baihaki.

Dengan kemampuan Bontang yang hanya mampu memasok maksimal delapan kargo, maka pada April 2001 kerugian yang sudah terjadi sekitar 20 juta dollar AS. "Pada bulan Maret belum ada kerugian, karena kebutuhan sudah dipenuhi. Namun, untuk bulan April, Mei, dan Juni ada potensi kerugian 20 juta dollar AS. Jangan lupa, pada bulan Juli nanti, Bontang sama sekali tidak bisa memasok kekurangan akibat berhentinya Exxon," tegas Dirut Pertamina.

Diakui, untuk kebutuhan dalam negeri yang selama ini dipasok oleh Arun tidak dapat diatasi. "LNG dari Arun ini juga dipakai untuk pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh. Nah untuk pabrik pupuk, kerugiannya sulit diatasi. Kerugian lain, adalah terhentinya kegiatan perekonomian di daerah itu, yang selama ini hidup dari beroperasinya kilang Arun," ungkap Dirut Pertamina ini.

Baihaki juga menegaskan jika Indonesia tidak mampu memenuhi komitmen pengiriman LNG ke Jepang dan Korea, maka tidak akan dikenakan penalti sebab situasi ini terjadi karena *force majeur* (faktor di luar dugaan yang menyebabkan gangguan).

"Kita tidak bisa di-*default* (dinyatakan gagal) karena ada *force majeur*, dan keadaan ini *force majeur*. Jadi, kita tidak melakukan wanprestasi. Namun, mereka akan mencari pasokan LNG dari negara lain, dan itu artinya kita kehilangan pasar. Jadi, kerugian kita adalah dalam jangka panjang, kita bisa kehilangan kontrak penjualan gas dengan pembeli," tegasnya.

Menanggapi kemungkinan Pertamina mengambil alih operasional Exxon di Arun, Baihaki menyatakan, "Opsi itu hanya salah satu. Namun, kita juga harus memperhatikan hak-hak Exxon. Kita terikat pada kontrak yang dibuat."

Peringatan yang sama juga disampaikan oleh Komisi VIII DPR. Pengambilalihan operasional Exxon di Arun harus dengan persetujuan Exxon. Sebab, tanpa persetujuan Exxon, akan dinilai sebagai langkah nasionalisasi. "Kita akan dikucilkan. Bagaimanapun Exxon punya hak terhadap ladang gas Arun," kata Emir.

Selain itu, menurut Emir, meski Pertamina yang mengoperasikan, jaminan keamanan tetap menjadi syarat mutlak. "Pertamina bisa menyatakan siap, tetapi soal keamanan, yang terancam bukan hanya orang Exxon, orang Pertamina pun bisa terancam," tegasnya.

Sementara dalam RDPU Komisi VIII DPR, Exxon menegas-

kan komitmennya untuk tidak meninggalkan Indonesia. Hal itu dibenarkan oleh Baihaki, karena Exxon masih memiliki proyek gas alam lain di Indonesia selain di Arun.

"Exxon masih punya proyek di Cepu. Kita menemukan cadangan gas alam yang cukup signifikan dan sekarang masih dihitung. Rencananya dalam dua tahun mendatang, ladang di Cepu itu bisa beroperasi. Saya usulkan dipercepat menjadi satu tahun, tetapi normalnya memang dua tahun. Cepu tidak sebesar Arun. Arun adalah yang terbesar," ungkap Dirut Pertamina Baihaki. **(ely/bw)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Rabu / 12 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 10 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 676.286 / TEKNOLOGI PERS

Mesin Koran Masa Depan

ANDA termasuk orang yang selalu rindu membaca koran dari Tanah Air saat bertugas di luar negeri? Memang sekarang ada teknologi Internet, dan hampir semua media massa punya versi elektronik sehingga bisa diakses dari komputer di mana pun Anda berada. Namun, orang sering tidak puas karena membaca berita format Internet tetap saja berbeda dengan berita di koran.

Dengan kemajuan teknologi, tak lama lagi para penggemar koran konvensional—yang bisa dibaca sambil ke toilet sekalipun—bolehlah bergembira. Tak peduli di mana pun Anda berada, selama mesin penjual koran masa depan tersedia, koran bisa diperoleh dalam bentuknya yang biasa: lembaran kertas dengan berbagai berita lengkap dengan iklannya.

Konsepnya sebenarnya lebih kurang sama dengan cetak jarak jauh yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan media massa. Bedanya, pada cetak jarak jauh *lay out* berita yang dikirim lewat satelit diterima dan dicetak oleh suatu perusahaan percetakan di tempat tujuan. Pada sistem ini, mesin cetaknya bisa di mana-mana karena ukurannya hanya sebesar ATM.

Sebagaimana mengoperasikan ATM, pembeli tinggal memenekan tombol untuk memilih kawasan asal koran diterbitkan, nama koran, dan memasukkan kartu kredit atau kartu khusus untuk membeli koran. Dalam waktu dua menit, *sreet... print-out* koran dengan tebal maksimum 48 halaman sudah di tangan.

Mesin penjual koran ini diperkenalkan perusahaan PEPC Worldwide yang berpusat di Den Haag, Belanda. PEPC bekerja sama dengan IBM mengembangkan program Private Multicast Satellite Network, tulang punggung distribusi koran secara digital ini di seluruh dunia.

Agar koranmya bisa dijual melalui mesin-mesin PEPC, pemilik koran tinggal mendaftar ke PEPC terdekat. Saat ini PEPC baru mempunyai cabang di New York, Miami dan Hongkong. Pemilik koran yang bergabung akan mendapat mesin yang menjadi tanggung jawabnya. Mesin-mesin inilah yang kemudian membentuk jaringan dengan mesin-mesin lain dari berbagai media massa di seluruh dunia sehingga koran dari Jakarta bisa langsung dinikmati begitu terbit, di mana saja. (NES)

SURAT KABAR JARAK JAUH

CARA PENGGUNAAN



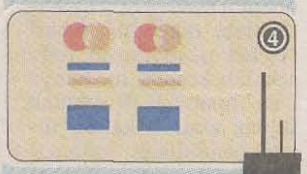
Pilih benua



Pilih negara



Pilih surat kabar yang ingin dibeli



Masukkan kartu unit

Sistem transmisi satelit memungkinkan pengiriman file secara digital.

Sumber: PEPC

Membaca koran lokal kini bisa dilakukan secara internasional lewat mesin penjual koran PEPC. Penerbit koran tinggal mengirim *layout* halaman yang sudah berisi berita melaui Internet ke pusat kontrol PEPC di Belanda.

Setelah delapan tahap pemrosesan, maksimum 30 menit, *file* surat kabar yang sudah lengkap dikirim ke jaringan satelit PEPC.

Mesin penjual koran PEPC di seluruh dunia akan menerima *file* surat kabar secara digital: 24 jam, 7 hari seminggu.

Mesin penjual koran PEPC mengirim catatan pembayaran dan menampilkan informasi lain yang diperlukan ke pusat pengontrol PEPC, yang kemudian meneruskannya kepada para penerbit koran yang bergabung.

